

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Atikah, Ika, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Haura Utama, Sukabumi.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, 2021, *Cerdas Memilih dan Menggunakan Kosmetik yang Aman*, BPOM RI, Jakarta.
- Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kosmetik, 2020, *A-Z Notifikasi Kosmetika di Indonesia*, BPOM RI, Jakarta.
- Handoyo, Eko, 2012, *Kebijakan Publik*, Widya Karya, Semarang.
- Hehanussa, DJ, *et al.*, 2023, *Metode Penelitian Hukum*, Widiana Bhakti Persada, Bandung.
- Hermawan, Asep, 2009, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*, Gramedia Widisarana Indonesia, Jakarta.
- HS, Salim, *et al.*, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis Buku Ke-2*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Huda, Muhammad Chairul, 2021, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, The Mahfud Ridwan Institute, Semarang.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2019, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV: 2020-2024*, Kementerian PPN, Jakarta.
- Kenedi, John, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, Mataram.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Solikin, Nur, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan.

Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Syahrur, Muhammad, 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Dotplus Publisher, Bengkalis.

Tedjosaputro, Liliana, 1995, *Etika Profesi Notaris: Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta.

Utama, S.A, *et al.*, 2021, *Problematika Penegakan Hukum*, Insan Cendekia Mandiri, Solok.

Yusuf, Muri, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5962), telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234), telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398), dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952)

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180)

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 949)

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446)

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Persyaratan Teknis Penandaan Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1623)

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1020)

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 279)

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pedoman Dokumen Informasi Produk Kosmetik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 588)

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611)

C. Jurnal, Tesis, Disertasi, Makalah

Achmad, Ruben, "Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana", *Legalitas Jurnl Hukum*, Vol. V. No. 2, 2013.

Ardianto, Ari, Hariri, Achmad, "Perlindungan Hukum Atas Pengguguran Kandungan Korban Perkosaan Ditinjau dari Hukum Nasional", *Media of Law and Sharia*, Vol. 2 No. 3, 2021.

Asirah, "Upaya Penegakan Hukum Peredaran Kosmetik Illegal Melalui E-Commerce Oleh PPNS BBPOM Makassar", *Unes Law Review*, Vol.5 No.3, 2023.

Dewita, Lisma, 2020, "Analisis Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Illegal oleh Penyidik BPOM Kota Pekanbaru", *Tesis*, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

Hamzah, Jefri, Muhammad, La Ode, "Efektivitas Penegak Hukum Terhadap

Pelaku Usaha Yang Memproduksi dan Memperdagangkan Kosmetik Illegal Berbahaya: Studi Polres Pelabuhan”, *Journal of Lex Theory*, Vol. 1 No. 1, 2020.

Hang, Ho Thi, Adjouro, Togo, “The Effects of Cross-Border E-Commerce on International Trade and Economic Growth: A Case of China”, *International Journal of Economics and Finance*, Vol. 13 No. 12, 2018.

Hasyim, N.F, *et.al.*, “Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar Dalam Perspektif Masalah (Studi Pada Pedagang Kosmetik di Pasar Maricaya Kota Makassar)”, *At Tawazun Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.1 No.1, 2021.

Lenaini, Ika, “Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling”, *Jurnal Historis*, Vol. 6 No. 1, 2021.

Loventa, Maharani, Rizkia, “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kasus Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepolisian RI (Studi Kasus Putusan Nomor 01/Pid Sus TPK/2017/Pn.Mdn), *Combines*, Vol. 1 No. 1, 2021.

Lubis, Marzuki, “Peranan Budaya Hukum Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional”, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2014.

Muhlis, Nursyahbani, Lisa, 2022, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengedaran Kosmetik Illegal di Kota Makassar”, *Tesis*, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Prasetyo, “Penegakan Hukum Oleh Aparat Penyidik Cyber Crime Dalam Kejahatan Dunia Maya di Wilayah Hukum Polda DIY”, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol.1 No. 2 2020.

Rahmanto, Yuri, Tony, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Berbasis Transaksi Elektronik”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 9 No. 1, 2019.

Rodliyah, *et.al.*, “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi (Cooperate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 5 No. 1, 2008.

Rongiyati, Sulasi, “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Dagang Melalui Sistem Elektronik”, *Negara Hukum*, Vol. 10 No.1, 2019.

Sanyoto, Sanyoto, “Penegakan Hukum Di Indonesia.”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8, No. 3, 2008.

Ukkasah, Aritya, Sangga, 2022, “Analisis Yuridis Peran BPOM Dalam Pengawasan Peredaran Kosmetik Illegal Ditinjau Dari Undang-Undang

Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”, *Tesis*, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan, Balikpapan.

Usman, Hermawan, Atang, 2014, “Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 30 No.1, 2014.

D. Internet

Advenia Elisabeth, “Kosmetik Illegal dan Palsu Menjamur, Banyak Dijual di E-Commerce”, <https://www.idxchannel.com/economics/kosmetik-ilegal-dan-palsu-menjamur-banyak-dijual-di-e-commerce>, diakses tanggal 29 Mei 2023

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “KBBI Daring Penelusuran Kosmetik”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kosmetik>, diakses tanggal 19 Maret 2024

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “KBBI Daring Penelusuran Illegal”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kosmetik>, diakses tanggal 23 Maret 2024

Badan POM, Profil BPOM, <https://www.pom.go.id/profil>, diakses tanggal 30 Januari 2024.

BBPOM Yogyakarta, “Menenal Kosmetik dan Penggunaannya”, <https://bbpom-yogya.pom.go.id/705-judul-menal-kosmetik-dan-penggunaannya.html>, diakses tanggal 10 Januari 2024

Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Badan POM, “BPOM Temukan Lebih Dari 2 Juta Pieces Produk Mengandung Bahan Dilarang/Berbahaya”, <https://www.pom.go.id/berita/bpom-temukan-lebih-dari-2-juta-pieces-produk-mengandung-bahan-dilarang-berbahaya>, diakses tanggal 16 Februari 2024

Cambridge Dictionary, “Cosmetic”, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/cosmetic>, diakses tanggal 19 Maret 2024

Campusquipper, “Rencana Strategis”, <https://campus.quipper.com/kampuspedia/rencana-strategis-renstra>, diakses tanggal 17 Juli 2024

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Badan POM, “Definisi Kosmetik”, <https://istanaumkm.pom.go.id/module-kosmetik/definisi-kosmetika>, diakses tanggal 10 Januari 2024

Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian Kemenkes RI, “Apa Itu Kosmetik Dilihat Dari Berbagai Sudut Pandang”, http://ebbkos.kemkes.go.id/web/blog_detail/2, diakses tanggal 19 Maret 2024

Dwitri Waluyo, “Kinclong Industri Kosmetik Tanah Air”, <https://www.indonesia.go.id/kategori/editorial/7984/kinclong-industri-kosmetik-tanah-air>, diakses tanggal 1 Maret 2024

Fiqih Rahmawati, “Penny K Lukito: Sistem Pengawasan Obat dan Makanan Tidak Hanya Dijalankan BPOM Saja”, <https://www.kompas.tv/nasional/349405/penny-k-lukito-sistem-pengawasan-obat-dan-makanan-tidak-hanya-dijalankan-bpom-saja>, diakses tanggal 5 Agustus 2024

Paralegal, “Arah Kebijakan”, <https://paralegal.id/pengertian/arrah-kebijakan/>, diakses tanggal 17 Juli 2024

Lusia Kus Anna, “Kulit Cerah Masih Jadi Dambaan Banyak Orang”, <https://lifestyle.kompas.com/read/2017/04/20/170000720/kulit.cerah.masih.jadi.dambaan.banyak.orang>, diakses tanggal 15 Februari 2024

Kementrian PANRB, Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, <https://www.menpan.go.id/site/tentang-kami/tentang-kami/visi-misi-presiden-dan-wakil-presiden-ri>, diakses tanggal 30 Januari 2024.

Komisi IX DPR RI, “Penindakan Peredaran Obat dan Kosmetik Ilegal Harus Timbulkan Efek Jera”, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41164/t/Penindakan+Peredaran+Obat+dan+Kosmetik+Ilegal+Harus+Timbulkan+Efek+Jera>, diakses tanggal 16 Februari 2024

Muhammad Rafi Darajati, “Refleksi 75 Tahun Kemerdekaan: Masa Depan Penegakan Hukum di Indonesia”, <https://untan.ac.id/refleksi-75-tahun-kemerdekaan-masa-depan-penegakan-hukum-di-indonesia/>, diakses tanggal 24 Juli 2024

Nafiatul Munawaroh, “Kapan Suatu UU Dinyatakan Berlaku?”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kapan-suatu-undang-undandinyatakan-berlaku-lt541eaf939db4b/>, diakses tanggal 23 Juli 2024

Nanda Akbar Gemilang, “Penelitian Deskriptif Adalah: Pengertian Kriteria, dan Ciri-cirinya”, <https://www.gramedia.com/literasi/penelitian-deskriptif/>, diakses tanggal 29 Maret 2024.

Nanda Akbar Gumilang, “Pengertian Wawancara”,
<https://www.gramedia.com/literasi/wawancara/>, diakses tanggal 15
Februari 2024

Priyamudi, “Reposisi PPNS dan Jaksa Penuntut Umum Dalam Tahap
Penyidikan”,
<https://kejaripulangpisau.kejaksaan.go.id/2022/03/14/reposisi-penyidik-pegawai-negeri-sipil-dan-jaksa-penuntut-umum-dalam-tahap-penyidikan/>,
diakses tanggal 22 Juli 2024

Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan, “BPOM Tindak Pabrik
Kosmetika Illegal yang Diduga Mengandung Bahan Dilarang”,
<https://www.pom.go.id/siaran-pers/bpom-tindak-pabrik-kosmetika-ilegal-yang-diduga-mengandung-bahan-dilarang>, diakses tanggal 25
Maret 2024

Pusat Data dan Informasi Obat Badan POM, “Membangun Budaya Integritas
Ber-AKLAK di BPOM”, <https://www.pom.go.id/berita/membangun-budaya-integritas-berakhlak-di-bpom> , diakses tanggal 24 Juli 2024

Reza Pahlevi, “Survei: Mayoritas Publik Belanja Kosmetik di E-Commerce”,
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/02/survei-mayoritas-publik-belanja-kosmetik-di-e-commerce>, diakses tanggal 25
Maret 2024

Safari Kasiyanto, “Tinjauan Masa Depan Dalam Hukum”,
<https://www.kompas.id/baca/opini/2022/06/23/tinjauan-masa-depan-dalam-hukum>, diakses tanggal 23 Juli 2024

Sekar Gandhawangi, “Pengawasan Obat dan Makanan Perlu Diperkuat”
https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/04/05/pengawasan-obat-dan-makanan-perlu-diperkuat?loc=hard_paywall, diakses
tanggal 23 Juli 2024

Selly Fitriyani Wahyu, “#BeautyHasNoGender: Tak Hanya Perempuan Yang
Boleg Pakai Make up, Laki-laki Juga Boleh”,
<https://www.konde.co/2023/01/beautyhasnogender-tak-hanya-perempuan-yang-boleh-pakai-make-up-laki-laki-juga-boleh/>, diakses
tanggal 19 Maret 2024

Tim Kumparan, “Pengertian Kuantitas dan Kualitas SDM Lengkap”,
<https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/pengertian-kuantitas-dan-kualitas-sumber-daya-manusia-lengkap-21ZNkCIOuVJ/full>, diakses
tanggal 23 Juli 2024

Vanya Karunia Mulia, “Sarana dan Prasarana; Definisi, Fungsi, Ruang
Lingkup, serta Contohnya”,

<https://www.kompas.com/skola/read/2021/08/24/142001469/sarana-dan-prasarana-definisi-fungsi-ruang-lingkup-serta-contohnya>, diakses tanggal 25 Juli 2024

Willa Wahyuni, Tiga Jenis Metodologi Untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/?page=all>, diakses tanggal 28 Maret 2024

Wikipedia Bahasa Indonesia, “Narasumber”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Narasumber>, diakses tanggal 15 Februari 2024

Wikipedia Bahasa Indonesia, “Penawaran dan Permintaan” https://id.wikipedia.org/wiki/Penawaran_dan_permintaan, diakses tanggal 25 Maret 2024

Wikipedia Bahasa Indonesia, “Penelitian Eksplanatori”, https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_eksplanatori, diakses tanggal 29 Maret 2024

E. Laporan

Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, 2023, *Laporan Kinerja Dalam Angka Triwulan IV Tahun 2023*, BPOM RI, Jakarta.

Balai Pengawas Obat dan Makanan Sofifi, 2023, *Laporan Tahunan BPOM Sofifi Tahun 2023*, BPOM Sofifi, Sofifi.

Balai Pengawas Obat dan Makanan Sofifi, 2021, *Rencana Strategis BPOM Sofifi 2020-2024*, BPOM Sofifi, Sofifi.

Deputi Bidang Penindakan Badan POM, 2022, *Laporan Kinerja Interim Triwulan II Deputi Bidang Penindakan Badan POM Tahun 2022*, Badan POM, Jakarta.

Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan Badan POM, 2023, *Laporan Tahunan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan Badan POM Tahun 2022*, Badan POM, Jakarta.

F. Bahan Ajar

Supriyadi, 2023, “Hukum Pidana Dalam Pelayanan Kesehatan”, Bahan Ajar Program Studi Magister Hukum Kesehatan